



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABU ANWAR**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **925822**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 615.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/165 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 429 m2/80.5 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 377 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
5. Tanah Seluas 498.75 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 139.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 100 L/SP.MTR.SOLO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 144.088.665

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 898.088.665

III. HUTANG

Rp. 29.401.625

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 868.687.040



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NASRUN HARAHAP
2. Jabatan : WAKIL KETUA BIDANG ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 809091

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 627.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/160 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
- Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000
- Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 107.000.000

- MOBIL, HONDA HONDA MOBILIO DD M.CVT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- MOTOR, HONDA SCOOTER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.115.979

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 755.115.979

III. HUTANG Rp. 119.175.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 635.940.979

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAIFUNNAJAR
2. Jabatan : WAKIL KETUA BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN
3. NHK : 802334

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 393.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah Seluas 361 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000
4. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 127.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA SP. MTR SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 13.661.241**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 547.661.241**III. HUTANG** Rp. 36.593.967**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 511.067.274



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI PURNOMO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK, DAN KEMAHASISWAAN
3. NHK : 925866

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.435.000.000

1. Tanah Seluas 2817 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1116 m2/200 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 7308 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 8457 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. Tanah Seluas 3093 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 1860 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 520 m2/300 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
8. Tanah Seluas 9182 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
9. Tanah Seluas 1648 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
10. Tanah Seluas 396 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
11. Tanah Seluas 396 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
12. Tanah Seluas 578 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL



SENDIRI Rp. 85.000.000

13. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL

SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **184.500.000**

1. MOTOR, HONDA NF 125 D KARISMA Tahun 1997, HASIL

SENDIRI Rp. 2.500.000

2. MOTOR, YAMAHA RX-K 135 CC Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOTER K1H02N14LOA/T Tahun 2015, HASIL

SENDIRI Rp. 10.000.000

4. MOTOR, HONDA SCOOTER X1H02N35M1 A/T Tahun 2020,

HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

5. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **22.763.005**

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. **1.642.263.005**

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.642.263.005**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIRA SUGIARTO
2. Jabatan : WAKIL KETUA BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA
3. NHK : 500869

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	390.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/260 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 363.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 559 m2/559 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10.500.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 14DAL115MIOSOLH Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	33.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	447.000.000
III. HUTANG	Rp.	24.950.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	422.050.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.